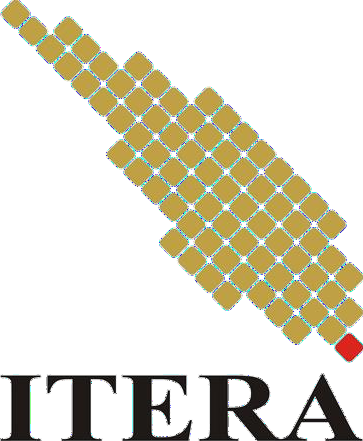
# ANALISIS NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL



Disusun oleh:

Stanislaus Vito Pramulia  
122380107

# PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

**2023-2024**

**PEMBAHASAN**

1. **Paten**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

**Analisis :**

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif atas hasil invensi di bidang teknologi, dapat dihubungkan dengan Program Studi Desain Komunikasi Visual sebagai berikut: "Pada Program Studi Desain Komunikasi Visual, 'paten' akan merujuk pada hak eksklusif dalam menciptakan desain visual yang inovatif dan teknis. Ini berarti bahwa desainer memiliki hak eksklusif untuk hasil karyanya, seperti logo, desain produk, atau elemen-elemen visual lainnya, yang dapat dilaksanakan sendiri atau diberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam konteks ini, 'inventor' dalam undang-undang dapat diartikan sebagai desainer visual yang menciptakan karya-karya unik dalam desain komunikasi visual, sedangkan 'teknologi' mencakup beragam alat, media, dan teknik yang digunakan dalam produksi visual. Oleh karena itu, Program Studi Desain Komunikasi Visual perlu memahami hak-hak paten terkait desain visual yang diberikan oleh negara, seiring dengan meningkatnya pentingnya perlindungan hak cipta dan inovasi dalam industri desain."

1. **Merek**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

**Analisis :**

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam konteks Program Studi Desain Komunikasi Visual, 'merek' mengacu pada elemen-elemen visual seperti logo, simbol, nama, atau susunan warna yang dirancang untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Pentingnya daya pembeda dalam merek sangat relevan dengan pembelajaran dalam program studi ini, di mana desainer visual harus memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menciptakan merek yang kuat dan mengkomunikasikan identitas unik untuk suatu produk atau layanan. Ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana merek dapat memengaruhi perilaku konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual perlu memiliki pengetahuan yang kuat tentang hukum merek, estetika desain, dan cara menghasilkan merek yang efektif.

1. **Desain Industri**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

**Analisis :**

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mendefinisikan desain industri sebagai karya kreasi yang mencakup bentuk, konfigurasi, garis, warna, atau gabungan dari elemen-elemen ini, yang secara visual memberikan kesan estetis. Lebih lanjut, desain industri dapat diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat digunakan untuk menciptakan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam konteks Program Studi Desain Komunikasi Visual, konsep ini menggarisbawahi pentingnya estetika dan kreativitas dalam menciptakan desain yang menarik dan fungsional. Mahasiswa program studi desain komunikasi visual mempelajari cara menggabungkan elemen-elemen desain untuk menciptakan kesan visual yang memikat, baik dalam desain grafis, produk, atau lingkungan. Pemahaman hukum dan konsep desain industri juga membantu desainer memahami perlindungan hak cipta dan aspek-aspek kreatif dalam pengembangan produk yang berdaya saing di pasar.

1. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

**Analisis:**

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mendefinisikan Sirkuit Terpadu sebagai produk yang mengintegrasikan elemen-elemen elektronik aktif dalam bahan semikonduktor untuk menciptakan fungsi elektronik. Meskipun tampaknya berfokus pada bidang teknik elektronik, konsep ini juga mencerminkan pentingnya desain dalam pengembangan teknologi. Dalam Program Studi Desain Komunikasi Visual, penting untuk memahami bahwa desain bukan hanya tentang estetika, tetapi juga melibatkan desain fungsional, yang mencakup produk elektronik seperti smartphone, perangkat medis, dan produk berbasis teknologi lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang desain tata letak sirkuit terpadu menjadi relevan karena desainer visual dapat berkontribusi dalam pengembangan produk yang lebih baik dalam hal tampilan, antarmuka pengguna, dan integrasi elemen desain dalam produk teknologi yang semakin kompleks.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Peraturan Perundang-undangan Nomor 14. Jakarta, Indonesia oleh Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan Perundang-undangan Nomor 15. Jakarta, Indonesia oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Peraturan Perundang-undangan Nomor 31. Jakarta, Indonesia oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Peraturan Perundang-undangan Nomor 32. Jakarta, Indonesia oleh Pemerintah Pusat.